

DAFTAR PUSTAKA

- Anawati, F,2003, Analisis Peranan Pajak Daerah Terhadap (PAD) Berkaitan Dengan Pemberlakuan Otonomi Daerah di Indonesia Studi kasus Pada Kab. Bantul, *Skripsi UMY*, Yogyakarta.

Bratakusuma Deddy, S, dan Solihin Dadang, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT. Granmedia Pustaka Utama, Jakarta.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.

Desy, A.N., 2005, Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Kalbar, *Skripsi Akuntansi*, UMY.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

Fujiyati, S., 2004, Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap PAD (Studi Empiris pada Kab./Kota di Propinsi Jabar), *Skripsi Akuntansi*, UMY.

Halim, Abdu, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Idrus, Muhammad, DR, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan dan Ilmu- Ilmu Sosial (Dua Pendekatan Kualitatif)*. Yogyakarta: UII.

Indriantoro, Nur dan Bambang, S, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi pertama, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.

Irasanti, 2004, Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di propinsi Jateng). *Skripsi Akuntansi*, UMY.

Landiyanto, E.A.,2001, *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah : Studi kasus Kota Surabaya*, Unair Surabaya, Indonesia.

Lestari, Bektı Senja, 2005, Dampak Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Terhadap Pajak dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Skripsi UPN Veteran*, Yogyakarta.

Iksan, 2001, *Otonomi Daerah dan Perubahan Manajemen Pemda*, Jurnal Forum Inovasi, November 2001.

Munawar I., 2001, *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*, TEMA, Volume II, Nomor I, Maret 2001.

Syaukani, H.R., Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, MA., 2002, *Otonomi Daerah (Dalam Negara Kesatuan)*, Pustaka Pelajar.

Ungki, T.M., 2003, Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap PAD (Studi Kasus Pada Kab. Sleman), *Skripsi SI*, UMY.

Undang-undang Dasar 1945, Setelah Amandemen Kedua Tahun 2002.

Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkaidah.

Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000, Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Perda No. 33 Tahun 2004, Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Bandung, Kuraikum Pratama.

UU No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Bandung, Kuraikum Pratama.

UU RI No. 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

UU No.5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah.